



PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
INSPEKTORAT

LAPORAN REALISASI  
RENCANA KERJA (RENJA)  
TRIWULAN I  
TAHUN 2025

*"Nasudhaiva Kutumbakam"*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Denpasar dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah direncanakan.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan dengan mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dengan selesainya Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2025, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini.

Dengan tersusunnya Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2025 ini, dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan dan perencanaan tahun berikutnya pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar. Kami berharap penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Denpasar ini dapat berguna bagi peningkatan kinerja dan nantinya dapat direalisasikan dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Denpasar.

Denpasar, 27 Maret 2025  
Inspektur Daerah Kota Denpasar,



Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650726 199201 2 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 LANDASAN HUKUM .....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
BAB II CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN.....	7
2.1 ANGGARAN BELANJA .....	7
2.2 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2024.....	10
BAB III EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2025 .....	19
3.1 EVALUASI TERHADAP RENCANA KERJA (RENJA).....	19
3.2 KENDALA & SOLUSI DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA YANG TELAH DITETAPKAN.....	28
3.3 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KOTA DENPASAR TAHUN 2025 .....	28
3.4 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025.....	29
3.5 DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN PADA TRIWULAN I TA. 2025.....	31
BAB IV PENUTUP.....	34

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Renja merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, untuk mengoperasionalkan RKPD dan berupaya mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja pelayanan yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Dukungan untuk bisa menerapkan pelaksanaan manajemen pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Inspektorat Kota Denpasar Menyusun Laporan Realisasi Renja. Penyusunan Realisasi Renja Inspektorat Kota Denpasar Triwulan I Tahun 2025 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta menunjukkan capaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan periode triwulanan.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Laporan Realisasi Rencana Kerja (Renja) Inspektorat merupakan realisasi pelaksanaan program kerja / kegiatan yang menunjang pembangunan daerah yang disusun berdasarkan :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
21. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);
22. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 32);
23. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Realisasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan I Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 dimaksudkan sebagai gambaran yang jelas tentang, realisasi IKU, realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran Inspektorat Daerah Kota Denpasar.

Tujuan Penyusunan Laporan Realisasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan I Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2025 adalah sebagai laporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Denpasar dalam pengawasan pemerintah daerah.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Laporan Evaluasi Renja yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### **BAB II CAPAIAN TARGET KINERJA & PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN**

Pada bab ini memuat anggaran belanja serta evaluasi capaian atas indikator kinerja pada program/kegiatan/sub kegiatan serta realisasi keuangan.

### **BAB III EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada bab ini memuat evaluasi renja, kendala & solusi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, evaluasi capaian indikator kinerja utama, evaluasi capaian indicator kinerja pembangunan serta dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

### **BAB IV PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan serta kaidah pelaksanaannya.

## BAB II

### CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN

#### 2.1 ANGGARAN BELANJA

Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 memiliki 3 program, 10 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi menjadi program prioritas, sementara Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota merupakan program yang menunjang operasional kantor. Pagu dana per Triwulan I (Pergeseran III) Tahun 2025 sebesar Rp. 35.670.451.301,- dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel. 2.1 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah per Triwulan I (Pergeseran III) Inspektorat Daerah Kota Denpasar**

Uraian	Jumlah
<b>BELANJA DAERAH</b>	Rp.35.670.451.301
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp.29.835.906.301</b>
Belanja Pegawai	Rp21.133.574.361
Belanja Barang dan Jasa	Rp.8.500.331.940
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>Rp.5.834.545.000</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.2.549.045.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.3.200.000.000
Belanja Modal Aset Lainnya	Rp.85.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.35.670.451.301</b>

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 hal Penguatan Inspektorat Daerah Pengawasan Pemerintah Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 alokasi anggaran pengawasan Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Perbandingan Anggaran Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Denpasar dengan APBD Kota Denpasar**

No.	Jenis Kegiatan	Anggaran Induk	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III
1.	Total Belanja APBD Pergeseran 2025	3.590.924.704.365	3.590.924.704.365	3.591.015.904.365	3.591.015.904.365
2.	Total Pagu Inspektorat Daerah Kota Denpasar	39.237.206.784	40.118.116.523	35.670.451.301	35.670.451.301
	2a. Anggaran Pegawai (Gaji dan Tunjangan)	21.281.728.844	22.162.638.583	21.335.574.361	21.335.574.361
	2b. Anggaran Diklat	5.280.834.000	5.280.834.000	3.280.834.000	3.280.834.000
	2c. Anggaran Sarana dan Prasarana Rutin	8.832.867.940	8.832.867.940	8.799.467.940	8.799.467.940
	2d. Anggaran Program Pengawasan	3.841.776.000	3.841.776.000	2.254.575.000	2.254.575.000
3.	Total Anggaran Pengawasan (2b+2c+2d)	17.955.477.940	17.955.477.940	14.334.876.940	14.334.876.940
4.	Persentase Anggaran Pengawasan terhadap APBD Kota Denpasar (3/1)	0,50%	0,50%	0,40%	0,40%

Pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 hal Penguatan Inspektorat Daerah Pengawasan Pemerintah Daerah disebutkan “untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah dengan klasifikasi 2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; c) diatas Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja dan diatas Rp.15.000.000.000, (lima belas miliar);

Anggaran Induk Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 telah memenuhi amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 hal Penguatan Inspektorat Daerah Pengawasan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 dimana proporsi anggaran pengawasan adalah 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja APBD Kota Denpasar. Per triwulan I Tahun 2025 anggaran

pengawasan Inspektorat Daerah Kota Denpasar terhadap APBD Kota Denpasar adalah 0,40% (nol koma empat puluh persen) dimana beberapa kegiatan mengalami dampak efisiensi yang menyebabkan kebutuhan anggaran pengawasan belum memadai dan tidak sesuai dengan amanat yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 hal Penguatan Inspektorat Daerah Pengawasan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025, hal ini adalah implementasi atas tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

## **2.2 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025**

Adapun ikhtisar pencapaian target kinerja & keuangan Inspektorat Kota Denpasar sampai dengan 26 Maret 2025 sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Triwulan I TA. 2025**

KODE REK.	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025		REALISASI SD TRIWULAN I TAHUN 2025		KET.
			KINERJA	Rp (Anggaran Pergeseran III)	KINERJA	Rp (per 26 Maret)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>						
	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>			<b>35.670.451.301</b>		<b>5.605.585.226</b>	
6.01.6.01.0.00.00 1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	<b>100 %</b>	<b>33,415,876,301</b>	<b>29%</b>	<b>5,601,020,226</b>	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>21,335,574,361</b>	<b>25%</b>	<b>5,159,353,870</b>	
6.01.6.01.0.00.001.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/ bulan	21,335,574,361	77 Orang/ bulan	5,159,353,870	Sampai dengan triwulan I gaji dan tunjangan semua pegawai dapat terpenuhi.
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3,280,834,000</b>	<b>25%</b>	<b>102,376,348</b>	
6.01.6.01.0.00.001.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	78 orang	3,280,834,000	25 orang	102,376,348	Sampai dengan triwulan I pegawai yang terjadwal mengikuti diklat di triwulan I dapat mengikuti diklat dengan baik.

KODE REK.	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025		REALISASI SD TRIWULAN I TAHUN 2025		KET.
			KINERJA	Rp (Anggaran Pergeseran III)	KINERJA	Rp (per 26 Maret)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>849,723,980</b>	<b>23%</b>	<b>42,038,900</b>	
6.01.6.01.0.00.001.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18,249,000	20%	-	Instalasi penerangan sudah berfungsi dengan baik sampai dengan Triwulan I.
6.01.6.01.0.00.001.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	124,625,500	25%	12,623,000	Peralatan dan perlengkapan kantor sudah terpenuhi sampai dengan Triwulan I
6.01.6.01.0.00.001.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	98,604,230	20%	-	Peralatan Rumah Tangga sudah terpenuhi sampai dengan Triwulan I.
6.01.6.01.0.00.001.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	144,788,250	25%	14,810,900	Dari target 2 paket, semua paket belanja aci-aci dan dekorasi sampai Triwulan I sudah terlaksana.
6.01.6.01.0.00.001.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	120,651,000	20%	-	Kebutuhann cetak dan penggandaan sudah terpenuhi sampai Triwulan I.

KODE REK.	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025		REALISASI SD TRIWULAN I TAHUN 2025		KET.
			KINERJA	Rp (Anggaran Pergeseran III)	KINERJA	Rp (per 26 Maret)	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.01.6.01.0.00.00 1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4 Dokumen	14,400,000	25%	2,430,000	Dari target 4 dokumen, 3 dokumen sudah terpenuhi setiap bulannya (Bali Post, Denpost, Nusa Bali).
6.01.6.01.0.00.001.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	158,600,000	25%	6,100,000	Kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu sudah terpenuhi sampai Triwulan I.
6.01.6.01.0.00.00 1.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Laporan	169,806,000	25%	6,075,000	Kebutuhan penyelenggaraan rapat sudah terpenuhi sampai dengan Triwulan I.
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2,261,045,000</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	
6.01.6.01.0.00.001.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	35 Unit	2,261,045,000	50%	-	Sampai dengan triwulan I beberapa pengadaan belanja modal sudah terlaksana.
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1,675,118,960</b>	<b>100%</b>	<b>229,037,308</b>	

KODE REK.	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025		REALISASI SD TRIWULAN I TAHUN 2025		KET.
			KINERJA	Rp (Anggaran Pergeseran III)	KINERJA	Rp (per 26 Maret)	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.01.6.01.00.001.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	196,800,000	25%	33,155,092	Pemenuhan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik sampai Triwulan I sudah terpenuhi.
6.01.6.01.00.001.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	112,560,000	25%	-	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor sudah terpenuhi sampai dengan Triwulan I.
6.01.6.01.00.001.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1,365,758,960	25%	195,882,216	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor sudah terpenuhi sampai dengan Triwulan I.
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4,013,580,000</b>	<b>25%</b>	<b>68,213,800</b>	
6.01.6.01.00.001.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	52,300,000	25%	7,500,000	Pemenuhan pemeliharaan kendaraan pimpinan sudah terpenuhi sampai Triwulan I.

KODE REK.	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025		REALISASI SD TRIWULAN I TAHUN 2025		KET.
			KINERJA	Rp (Anggaran Pegereran III)	KINERJA	Rp (per 26 Maret)	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.01.6.01. 0.00.001. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	30 Unit	438,780,000	25%	60,713,800	Pemenuhan pemeliharaan kendaraan operasional sudah terpenuhi sampai Triwulan I.
6.01.6.01. 0.00.001. 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	5 Unit	3,522,500,000	25%	-	Sampai dengan triwulan 1 pemeliharaan masih berproses.
6.01.6.01. 0.00.00 2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Kapabilitas APIP; Maturitas SPIP</b>	<b>Level 3; Level 3</b>	<b>849,856,000</b>	<b>20%</b>	<b>1,350,000</b>	
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>100%</b>	<b>764,536,000</b>	<b>19%</b>	<b>1,350,000</b>	
6.01.6.01. 0.00.002. 2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	511,857,000	20%	1,350,000	Pengawasan kinerja masih berjalan sampai dengan triwulan I.
6.01.6.01. 0.00.002. 2.01.02.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	81,237,000	25%	-	-
6.01.6.01. 0.00.002. 2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	9,823,500	20%	-	-

KODE REK.	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025		REALISASI SD TRIWULAN I TAHUN 2025		KET.
			KINERJA	Rp (Anggaran Pegereran III)	KINERJA	Rp (per 26 Maret)	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.01.6.01. 0.00.002. 2.01.04.	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	111,377,000	25%	-	-
6.01.6.01. 0.00.002. 2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1 Laporan	16,669,500	-	-	-
6.01.6.01. 0.00.002. 2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	33,572,000	25%	-	Monitoring tindaklanjut BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi Bali, APIP sudah berjalan dengan baik.
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>100%</b>	<b>85,320,000</b>	<b>20%</b>	<b>-</b>	
6.01.6.01. 0.00.002. 2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	1 Laporan	14,182,000	20%	-	Penanganan Penyelesaian Kruneq sudah berjalan dengan baik.
6.01.6.01. 0.00.002. 2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8 Laporan	71,138,000	20%	-	-

KODE REK.	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025		REALISASI SD TRIWULAN I TAHUN 2025		KET.
			KINERJA	Rp (Anggaran Pegereran III)	KINERJA	Rp (per 26 Maret)	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.01.6.01.0.00.003.	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase OPD yang didampingi / yang mendapat pendampingan</b>	<b>70 %</b>	<b>1,404,719,000</b>	<b>24%</b>	<b>3,215,000</b>	
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan</b>	<b>100%</b>	<b>48,846,000</b>	<b>23%</b>	<b>2,315,000</b>	
6.01.6.01.0.00.003.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	2 Rekomendasi	9,224,000	25%	2,315,000	-
6.01.6.01.0.00.003.2.01.02.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun	2 Rekomendasi	39,622,000	20%	-	-
	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Persentase Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>100%</b>	<b>1,355,873,000</b>	<b>25%</b>	<b>900,000</b>	
6.01.6.01.0.00.003.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	38 Perangkat Daerah	67,928,000	25%	900,000	Pendampingan perangkat daerah sudah terlaksana dengan baik sampai dengan Triwulan I.

KODE REK.	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025		REALISASI SD TRIWULAN I TAHUN 2025		KET.
			KINERJA	Rp (Anggaran Pergeseran III)	KINERJA	Rp (per 26 Maret)	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.01.6.01.0.00.003.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	36 Perangkat Daerah	51,907,000	25%	-	-
6.01.6.01.0.00.003.2.02.03.	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	1,000,682,000	25%	-	-
6.01.6.01.0.00.003.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	36 Perangkat Daerah	235,356,000	25%	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>35.670.451.301</b>		<b>5.605.585.226</b>	

### BAB III

## EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2025

### 3.1 EVALUASI TERHADAP RENCANA KERJA (RENJA)

Pelaksanaan evaluasi ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana Inspektorat Daerah sudah melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja sesuai dengan Permendagri Nomor 87 Tahun 2007 tentang pada Tabel T.E.1. halaman 495 disebutkan :

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Realisasi kinerja sampai Triwulan I tahun 2025 sebesar 24%. Sementara itu, Realisasi keuangan sampai Triwulan I Tahun 2025 sebesar

Rp. 5.605.585.226,- atau 15.71 % dari total anggaran sebesar Rp. 35.670.451.301,-. Berikut adalah seluruh program dan kegiatan yang dijabarkan pada tabel :

**Tabel 3.1 Evaluasi Renja Triwulan I Tahun 2025**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) (Tahun 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) (Tahun 2022-2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Capaian terhadap target tahun berjalan		Realisasi sd tahun berjalan		Capaian terhadap target akhir renstra	
			5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatian	100	127.639.512.185	100	61,041,265,222	100	33,415,876,301	29	5,601,020,226							29	5,601,020,226	29	17	329	66,642,285,448	75	52
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	99.206.103.066	100	47,286,263,974	100	21,335,574,361	25	5,159,353,870							25	5,159,353,870	25	24	325	52,445,617,844	108	53
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	99.188.122.941	100	47,280,263,974	100	21,335,574,361	25	5,159,353,870							25	5,159,353,870	25	24	325	52,439,617,844	65	53
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	100	17.980.125	100	6,000,000	-	-	-	-							-	-	-	-	300	6,000,000	150	33
	Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	8.520.018.335	100	2,789,784,608	100	3,280,834,000	25	102,376,348							25	102,376,348	25	3	325	2,892,160,956	65	34
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	8.520.018.335	100	2,789,784,608	100	3,280,834,000	25	102,376,348							25	102,376,348	25	3	325	2,892,160,956	65	34
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	4.715.442.037	100	2,249,561,753	100	849,723,980	23	42,038,900							23	42,038,900	23	5	323	2,291,600,653	65	49
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	53.584.646	100	33,205,497	100	18,249,000	20	-							20	-	20	-	320	33,205,497	64	62

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) (Tahun 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) (Tahun 2022-2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Capaian terhadap target tahun berjalan		Realisasi sd tahun berjalan		Capaian terhadap target akhir renstra	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100%	
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kantor yang disediakan	100	913.950.345	100	761,769,820	100	124,625,500	25	12,623,000							25	12,623,000	25	10	325	774,392,820	65	85
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	100	120.944.414	100	69,769,575	100	98,604,230	20	-							20	-	20	0	320	69,769,575	64	58
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100	625.456.194	100	304,808,000	100	144,788,250	25	14,810,900							25	14,810,900	25	10	325	319,618,900	65	51
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	517.265.444	100	271,258,788	100	120,651,000	20	-							20	-	20	0	320	271,258,788	64	52
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	100	226.160.006	100	47,010,500	100	14,400,000	25	2,430,000							25	2,430,000	25	17	325	49,440,500	65	22
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	934.966.500	100	476,215,000	100	158,600,000	25	6,100,000							25	6,100,000	25	4	325	482,315,000	65	52
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	1.323.114.488	100	285,524,573	100	169,806,000	25	6,075,000							25	6,075,000	25	4	325	291,599,573	65	22
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	3.291.153.821	100	973,216,426	100	2,261,045,000	50	-							50	-	50	0	350	973,216,426	70	30

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) (Tahun 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) (Tahun 2022-2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Capaian terhadap target tahun berjalan		Realisasi sd tahun berjalan		Capaian terhadap target akhir renstra	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100%	
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	3.291.153.821	100	973,216,426	100	2,261,045,000	50	-							50	-	50	0	350	973,216,426	70	30
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	7.966.990.157	100	4,154,545,792	100	1,675,118,960	25	229,037,308							25	229,037,308	25	14	325	4,383,583,100	70	55
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	613.122.263	100	374,006,511	100	196,800,000	25	33,155,092							25	33,155,092	25	17	325	407,161,603	65	66
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	321.948.704	100	148,286,650	100	112,560,000	25	-							25	-	25	0	325	148,286,650	81	46
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100	7.031.919.190	100	3,632,252,631	100	1,365,758,960	25	195,882,216							25	195,882,216	25	14	325	3,828,134,847	65	54
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	3.939.804.769	100	3,587,892,669	100	4,013,580,000	25	68,213,800							25	68,213,800	25	2	325	3,656,106,469	70	93

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) (Tahun 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) (Tahun 2022-2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Capaian terhadap target tahun berjalan		Realisasi sd tahun berjalan		Capaian terhadap target akhir renstra	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100%	
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	173.279.199	100	89,996,600	100	52,300,000	25	7,500,000							25	7,500,000	25	14	325	97,496,600	65	56
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	2.089.380.570	100	867,205,250	100	438,780,000	25	60,713,800							25	60,713,800	25	14	325	927,919,050	65	44
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	1.677.145.000	100	2,630,690,819	100	3,522,500,000	25	-							25	-	25	0	325	2,630,690,819	81	157
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Maturitas SPIP Kapabilitas APIP	100	1.690.900.175	275	1,001,760,573	100	849,856,000	20	1,350,000							20	1,350,000	20	0	845	1,003,110,573	65	59
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100	1.273.138.388	350	830,326,167	100	764,536,000	19	1,350,000							19	1,350,000	19	0	1069	831,676,167	70	65
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100	81.557.793	100	135,388,000	100	511,857,000	20	1,350,000							20	1,350,000	20	0	220	136,738,000	55	168
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100	106.994.045	100	49,475,750	100	81,237,000	25	-							25	-	25	0	225	49,475,750	56	46
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	100	109.876.970	100	22,629,500	100	9,823,500	20	-							20	-	20	0	220	22,629,500	55	21

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) (Tahun 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) (Tahun 2022-2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Capaian terhadap target tahun berjalan		Realisasi sd tahun berjalan		Capaian terhadap target akhir renstra	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100%	
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	100	95.487.561	100	37,759,900	100	111,377,000	25	-							25	-	25	0	225	37,759,900	56	40
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	100	92.836.080	100	21,003,750	100	16,669,500	-	-							0	-	0	0	200	21,003,750	50	23
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	100	555.652.988	100	477,956,826	100		-	-							0	-	0	0	300	477,956,826	150	86
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100	230.732.951	100	86,112,441	100	33,572,000	25	-							25	-	25	0	325	86,112,441	65	37
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100	417.761.787	200	171,434,406	100	85,320,000	20	-							20	-	20	0	620	171,434,406	60	41
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	100	79.843.318	100	16,172,000	100	14,182,000	20	-							20	-	20	0	220	16,172,000	55	20
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100	337.918.469	100	155,262,406	100	71,138,000	20	-							20	-	20	0	320	155,262,406	64	46
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang didampingi / yang mendapat pendampingan	100	1.561.672.977	200	1,209,066,823	100	1,404,719,000	24	3,215,000							24	3,215,000	24	0	624	1,212,281,823	60	78

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) (Tahun 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) (Tahun 2022-2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Capaian terhadap target tahun berjalan		Realisasi sd tahun berjalan		Capaian terhadap target akhir renstra	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100%	
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100	171.386.551	100	74,044,643	100	48,846,000	23	2,315,000							23	2,315,000	23	5	323	76,359,643	65	45
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	100	55.072.523	100	22,751,956	100	9,224,000	25	2,315,000							25	2,315,000	25	25	325	25,066,956	65	46
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun	100	116.314.028	100	51,292,687	100	39,622,000	20	-							20	-	20	0	320	51,292,687	64	44
	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi	100	1.390.286.426	100	1,135,022,180	100	1,355,873,000	25	900,000							25	900,000	25	0	225	1,135,922,180	56	82
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	100	148.605.586	100	36,277,880	100	67,928,000	25	900,000							25	900,000	25	1	225	37,177,880	56	25
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	100	123.738.579	100	43,068,060	100	51,907,000	25	-							25	-	25	0	225	43,068,060	56	35

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) (Tahun 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) (Tahun 2022-2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Capaian terhadap target tahun berjalan		Realisasi sd tahun berjalan		Capaian terhadap target akhir renstra		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100%		
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	100	973.990.500	100	1,016,766,100	100	1,000,682,000	25	-							25	-	25	0	225	1,016,766,100	56	104	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	100	143.951.761	100	38,910,140	100	235,356,000	25	-							25	-	25	0	225	38,910,140	56	27	
Rata-rata capaian kinerja (%) :																		25			0		56	82	
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			35.670.451.301,00						
JUMLAH REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																			5.605.585.226,00						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																		24	15.71						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3) DENGAN CAPAIAN RENSTRA S.D TAHUN KE 3 TRIWULAN I																		67							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : perencanaan yang sudah terstruktur sehingga keberhasilan kinerja dapat dicapai dan evaluasi kendala dapat diprediksi.																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja : padatnya penugasan mandatory dan wajib serta pemenuhan penyelenggaraan kegiatan dan pemenuhan kompetensi APIP yang menyebabkan penyelesaian penugasan terkendala waktu..																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **) : Menegaskan pembagian tugas dan dateline kepada masing-masing tim																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya **) : Perencanaan kinerja agar selalu disusun berdasarkan amanat untuk Jakwas APIP.																									

### 3.2 KENDALA & SOLUSI DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA YANG TELAH DITETAPKAN

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar. Dalam hal pelaksanaan pencapaian target kinerja, berikut kendala yang dialami Inspektorat Daerah Kota Denpasar :

- a. Beberapa kegiatan pengawasan terlaksana lebih lama dari waktu yang ditetapkan pada surat tugas karena bersamaan dengan penugasan *mandatory* lainnya (Diklat dan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan BPK) namun semuanya dapat terselesaikan tepat waktu.

Dalam menghadapi kendala tersebut, berikut solusi yang dilaksanakan :

- a. Menyusun jadwal pekerjaan rutin dan *mandatory* serta melakukan manajemen waktu secara maksimal, selain itu melakukan monitoring berkala di setiap penugasan yang diberikan.

### 3.3 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KOTA DENPASAR TAHUN 2025

Tabel 3.2 Capaian IKU Inspektorat Kota Denpasar

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja sd Triwulan I	Ket.
1	Predikat SAKIP	BB (78,35)	-	Inspektorat Daerah Kota Denpasar sampai dengan triwulan I Tahun 2025 sedang melaksanakan evaluasi, tahap pengumpulan dokumen sudah dilaksanakan, saat ini masih dalam proses evaluasi internal. Pada tanggal 17-18 Pebruari Inspektorat Daerah Kota Denpasar telah melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2024.
2	Opini BPK	WTP	-	Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Denpasar telah melakukan

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja sd Triwulan I	Ket.
				pendampingan BPK atas pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan dari tanggal 10 Februari sampai 21 Maret 2025.
3	Level Kapabilitas APIP	Level 3	-	Inspektorat Daerah Kota Denpasar sampai dengan triwulan I Tahun 2025 telah melaksanakan pemenuhan profil dan elemen pada portal BPKP <a href="http://www.apip.bpkp.go.id">www.apip.bpkp.go.id</a> .
4	Level Maturitas SPIP	Level 3	-	Inspektorat Daerah Kota Denpasar sampai dengan triwulan I Tahun 2025 dalam mendukung pelaksanaan maturitas SPIP Kota Denpasar, telah melaksanakan bimbingan teknis Manajemen Risiko dan SPIP Terintegrasi pada tanggal 19 Maret 2025.
5	Persentase OPD yang didampingi / yang mendapat pendampingan	80%	21%	Sampai dengan Triwulan I, Pendampingan OPD telah dilaksanakan sesuai jadwal Program Kerja Pemeriksaan Tahunan dan sesuai kunjungan OPD yang memerlukan pendampingan tambahan ke Inspektorat.

### 3.4 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025

**Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Inspektorat Kota Denpasar**

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target 2025	Realisasi Kinerja sd Triwulan I	Ket.
1	Persentase tindak lanjut temuan	80%	98.64%	Data realisasi sd Semester II Tahun 2024 bersifat fluktuatif berdasarkan pada bertambahnya jumlah temuan maka mengakibatkan persentase tindak lanjut temuan berubah.

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target 2025	Realisasi Kinerja sd Triwulan I	Ket.
2	Jumlah temuan BPK	20	-	Data realisasi terdiri dari 2 Laporan Pemeriksaan, yaitu Pemeriksaan LKPD dan Pemeriksaan Kinerja. Sampai saat ini pemeriksaan sedang berlangsung.

### 3.5 DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN PADA TRIWULAN I TA. 2025

Rapat dan Sosialisasi Koordinasi Pengawasan Tahu 2025



Bimbingan Teknis BOSP



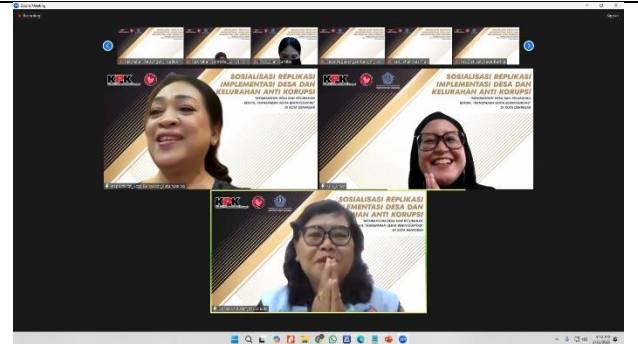
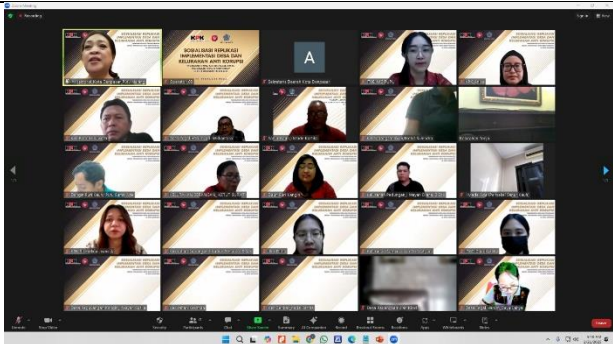
Bimbingan Teknis Manajemen Risiko dan SPIP Terintegrasi



Menerima Kunjungan Tamu Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Timur beserta Inspektorat Daerah Kabupaten Kota se-Jawa Timur



Sosialisasi Replikasi Implementasi Desa dan Kelurahan Anti Korupsi



Forum Perangkat Daerah Inspektorat



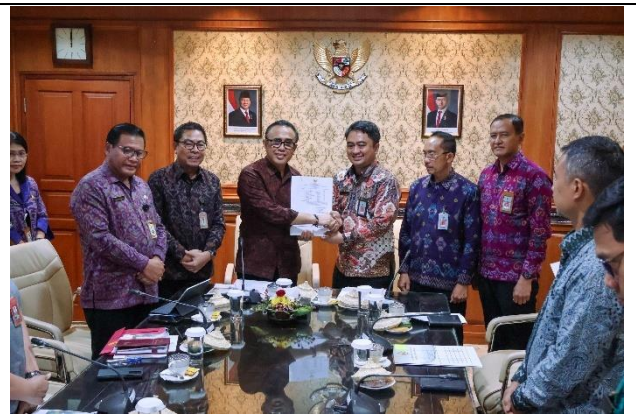
Peluncuran Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025



Rapat Pembahasan Tindak Lanjut BPK RI



Exit Meeting BPK - RI



## BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Evaluasi Rencana Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar yang disusun sebagai implementasi dari Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, dan kegiatan, yang dilakukan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Laporan Evaluasi Rencana Kerja ini.

Dengan kesungguhan dalam menyusun Laporan Evaluasi Rencana Kerja pada Inspektorat Kota Denpasar dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan apabila ada kekeliruan akan diadakan revisi/perbaikan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 27 Maret 2025

Inspektur Daerah Kota Denpasar,



Ir. Putu Naning Djyaningsih, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650726 199201 2 001

